

Harus Patuhi Perundangan

Divestasi Saham Newmont

JAKARTA-Kementerian Keuangan dan ESDM diminta mematuhi undang-undang (UU) seputar kisruh pembelian sisatujuh persen divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT). Permintaan ini disampaikan berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan ada pelanggaran dalam pembelian saham oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemrov NTB) juga diminta fokus pada persiapan pembelian sisa saham itu. Persiapan yang matang, terbuka, dan transparan, akan membuktikan bahwa NTB benar-benar siap membeli saham itu.

Desakan tersebut disampaikan Pimpinan Komisi XI DPR Harry Azhar Azis di Jakarta, Selasa (8/11). Ia mengemukakan, langkah Kementerian ESDM yang menyerahkan persoalan kisruh pembelian saham kepada Kementerian Hukum dan HAM hanya

akal-akalan belaka. Ini karena sudah ada hasil audit BPK. Hasil itu sebenarnya bisa

dijadikan rujukan. "Jadi, pemerintah tidak perlu cari-cari alasan untuk melanggar UU," ujar Harry.

Harry mengemukakan, setiap rupiah uang APBN yang digunakan harus mendapatkan persetujuan DPR. "Ini pendapat arsitek UUD'45 Prof DR. Soepomo. Jadi, Pemerintah hendaknya bersikap dewasa dan mematuhi aturan UU yang berlaku bukannya berusaha

melanggar," kata Harry.

Ia mengingatkan, ngototnya Menkeu dan kelompok pendukungnya sangat berbahaya bagi kelangsungan sistem ketatanegaraan negeri ini. "Lembaga seperti DPR dan BPK sudah tidak dihargai. Kalau sudah begini bagaimana kelanjutan hubungan kelembagaan negara kita?" tanyanya.

Pernyataan senada juga dikemukakan Politisi PDIP di Komisi XI Arif Budimanta. Arif mengungkapkan, pemerintah secara konstitusional harus ikut dan tunduk kepada hasil audit BPK soal Newmont. Sebab, pembelian saham itu memang harus seizin DPR. "Mengapa minta izin saja sungkan? Apakah pemerintah serius soal Newmont ini?" tanyanya.

Direktur eksekutif Mega Institut ini menjelaskan, BPK adalah lembaga negara yang memiliki kredibilitas. Hasil audit Newmont yang disampaikan ke DPR itu ditandatangani Ketua BPK. Kemudian pemerintah - dalam hal ini Kemenkeu dan Kementerian ESDM - tidak mematuhi.

"Karena sudah menyangkut soal kelembagaan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus bersikap tegas. Berdasarkan hasil audit BPK, sebaiknya Presiden memerintahkan pembatalan pembelian saham oleh PIP dan kemudian menyerahkan pada daerah," ujar Arif sambil menambahkan jangan sampai ada penilaian Presiden membiarkan para menteri melanggar UU.

Sementara itu anggota DPD dari NTB, Ratu Ganefi menyatakan, sebagai daerah penghasil tambang, NTB sangat berminat membeli saham Newmont. (dms)